

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONE**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023.

LKjIP Perangkat Daerah merupakan bentuk komitmen nyata Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Badan Pendapatan Daerah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Tujuan penyusunan LKjIP untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra)

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing Perangkat Daerah serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian sasaran saat ini sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja pada masa yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.



KEPALA BADAN

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pembina Utama Muda / IVc

Nip : 19660717 198603 1 009

DAFTAR ISI

ii

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
SISTEMATIKA PENULISAN	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. UMUM	1
B. ORGANISASI	2
C. ISU STRATEGIS	5
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	6
BAB II PERENCANA KINERJA.....	7
A. TUJUAN DAN SASARAN	7
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	9
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	11
D. PERJANJIAN KINERJA	12
E. STANDAR PENILAIAN KINERJA.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	14
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023.....	16
3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra.....	17
4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya	18
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....	19
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	22
7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja	24
B. REALISASI ANGGARAN	37
BAB IV PENUTUP	38

Tata urutan atau sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone disusun dengan mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Tata urutan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan / ikhtiar perjanjian kinerja tahun kepada yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya :

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
8. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Berisi perjanjian kinerja dan lain lain yang dianggap perlu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKj Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Badan Pendapatan Daerah merupakan proses untuk menilai

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

B. ORGANISASI

Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. mempunyai Tugas untuk penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut:

Tugas pokok : untuk penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERBUP
SOTK
BAPENDA

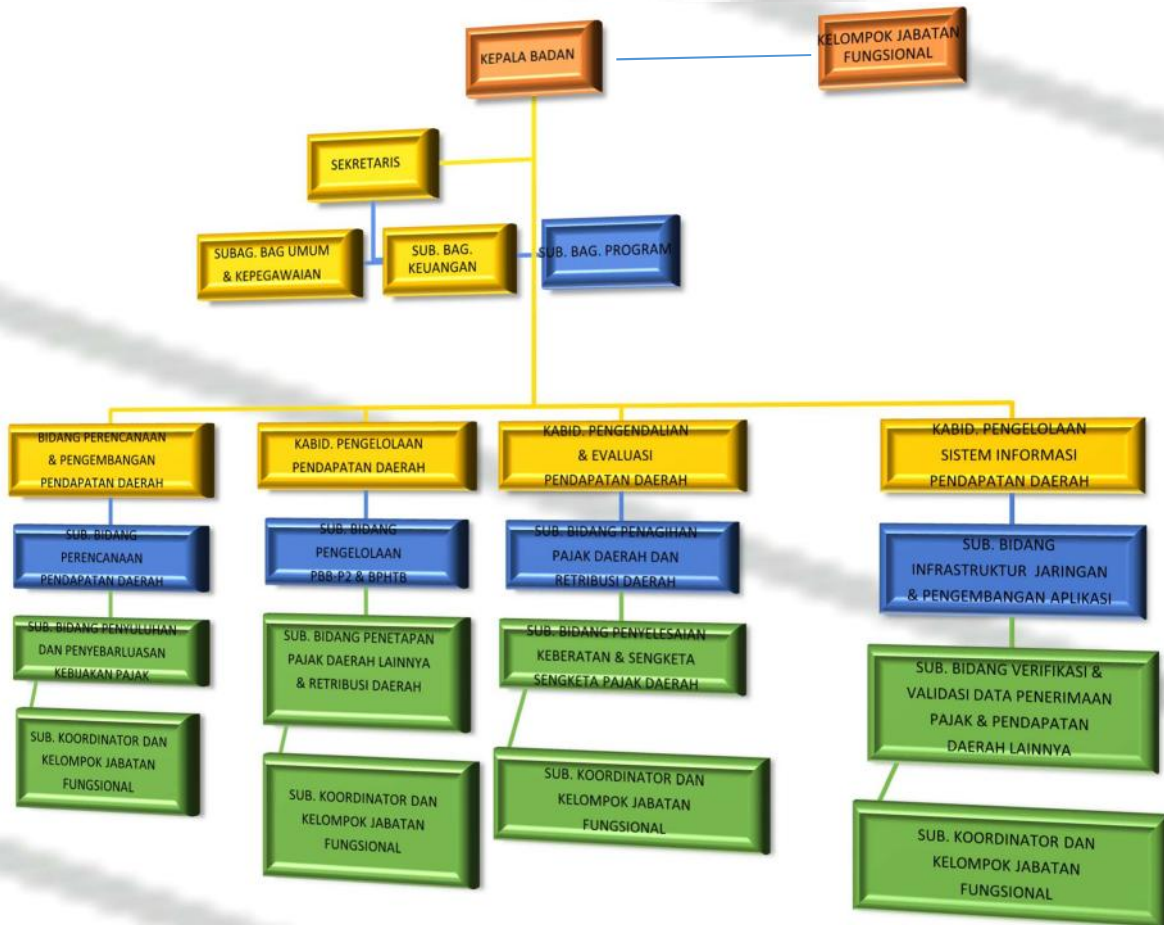


Untuk lebih jelas dari susunan organisasi dapat dilihat pada struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Fungsi:

-) Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah
-) Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta
-) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pengendalian & evaluasi pendapatan daerah penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta
-) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan & pengembangan pendapatan daerah

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH



Sumber data : PERBUP SOTK BAPENDA

Susunan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dan perlengkapan yang dimiliki yang merupakan elemen penting dalam menggerakkan organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi. Susunan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan yang telah mengikuti Diklatpim.



Sumber data: Dokumen Data Umum Kepegawaian BAPENDA

C. ISU STRATEGIS

Tantangan dalam Pelayanan pada Era globalisasi dan keterbukaan informasi, diharapkan pelayanan publik semakin efisien dan terukur baik dari segi waktu dan pembiayaan. Disamping itu juga mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat di daerah-daerah strategis dan potensial, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak daerah/retribusi daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone didalam melaksanakan tugas dan fungsi menghadapi beberapa permasalahan/kendala yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kontribusi/Rasio PAD terhadap APBD masih rendah
2. Tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak belum memadai.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam mengembangkan pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (Faktor Kunci Keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup :

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai agar menjadi SDM yang lebih handal dan berkompeten

Bimtek penggunaan aplikasi SIMPADA



2. Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah

Sosialisasi Peraturan Daerah



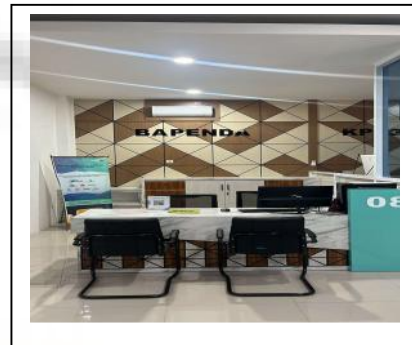
3. Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah Berbasis IT

Penggunaan alat MPOS



4. Keikutsertaan BAPENDA dalam pelaksanaan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bone

Layanan Dalam MPP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Visi Pembangunan Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah:

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian

lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan disasar oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah pada misi :

1. Misi kesatu : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Tujuan dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2021-2023

N O	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun		
				2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan daerah		Rasio PAD	10,50	10,62	10,50
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Badan Pendapatan Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	BB	BB
3		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Presentase rata rata kenaikan PAD	13,35	6,50	6,50
4		Meningkatnya penggunaan teknologi Digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	100	100	100

Sumber Data : Dokumen Renstra Perubahan 2018 – 2023

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik :

1. Strategi

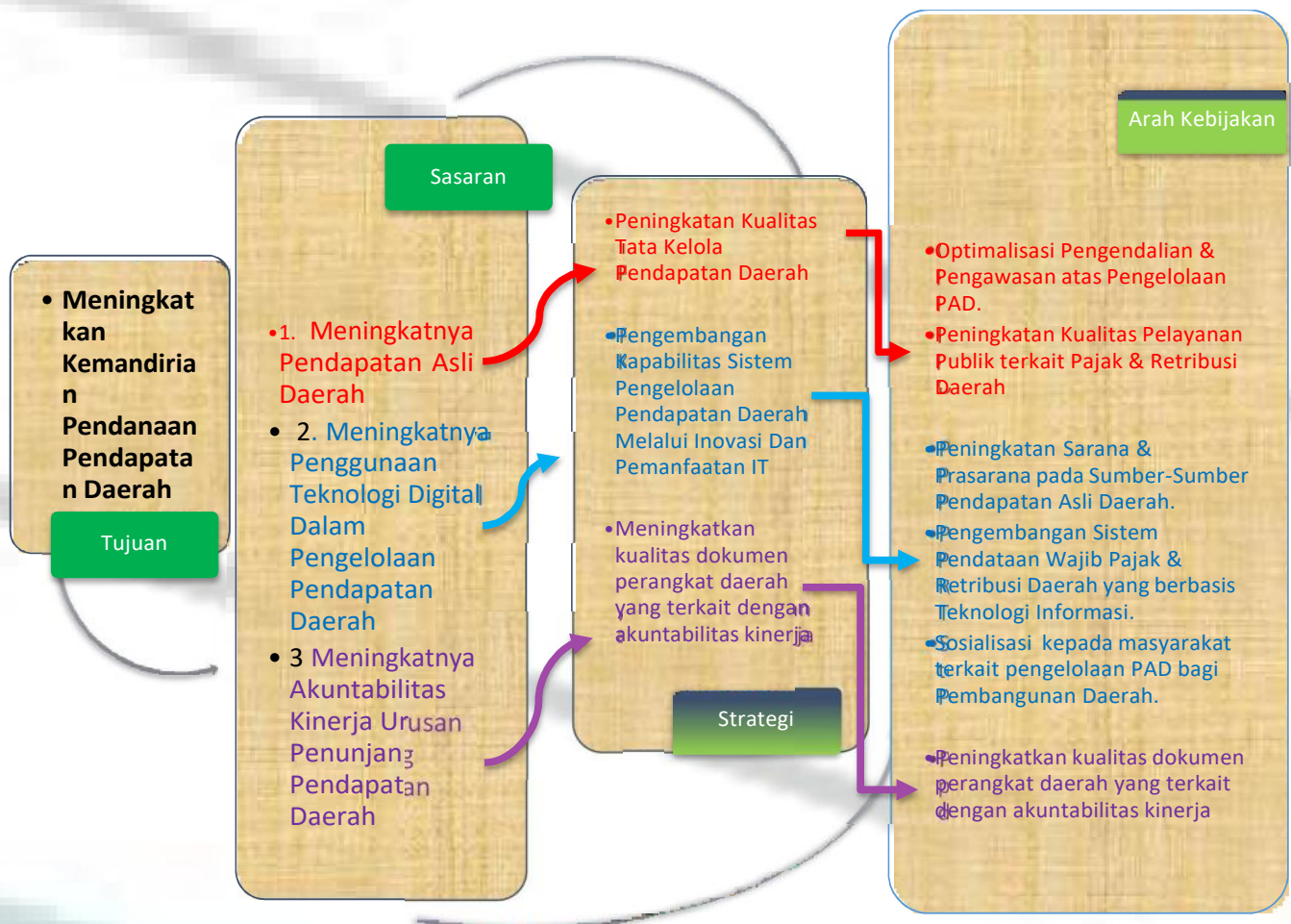
Strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai

dengan misi yang hendak diraihny sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Gambar
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan



Dalam hal ini menunjukkan bahwa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sudah relevan dan konsisten terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Penjelasan / Formulasi Perhitungan
1	Tujuan : Meningkatkan kemandirian pendanaan pendapatan daerah	Rasio PAD	
2	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dipublikasikan Oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone
3	Sasaran: Meningktanya Pendapatan Asli daerah	Persentase Rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah	
4	Sasaran : Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	

Sumber data : Perbup Nomor 101 tahun 2021 tentang IKU

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Taunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Persen)	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatkan Kemandirian Pemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah		Rasio PAD	10,50		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kab/Kota	9,344,943,313
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	6.50	Pengelolaan Pendapatan daerah	5.594.882.630
	Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	100		
Jumlah					14,939,825,943

Sumber data : Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN
KINERJA
PERUBAHAN
2023**



**PERJANJIAN
KINERJA
2024**

E. STANDARD PENILAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolak ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
>100 %	Sangat tercapai / Sangat berhasil
90 % x < 110%	Tercapai / Berhasil
60 % x < 90 %	Cukup Tercapai / Cukup berhasil
x < 60 %	Tidak tercapai / Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung presentase target capaian indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan membandingkan antara terget kinerja setiap indikator tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan / sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah meliputi :

Tabel 3.1

Rencana Strategis BAPENDA Tahun 2023

Tujuan 1 Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan daerah dengan Indikator : Rasio PAD	
Sasaran	Indikator
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah
Meningkatnya Penggunaan Teknologi Digital Dalam Pengelolaan Pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Badan Pendapatan Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2023 sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Keterangan
	Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan daerah	Rasio PAD	10,50	10	95%	Tercapai / Berhasil
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah	6,50	17	262	Sangat Tercapai / Sangat Berhasil
	Meningkatnya Penggunaan Teknologi Digital Dalam Pengelolaan Pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	100	100	100	Tercapai / Berhasil
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Badan Pendapatan Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB	BB	100	Tercapai / Berhasil
Rata – rata					139%	Tercapai / Berhasil

Sumber data : Evaluasi RENJA tahun 2023

Berdasarkan data diatas rata rata capaian kinerja 139% dengan kategori pencapaian kinerja Melampaui Target.



2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2023

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah 2021- 2023. Adapun realisasi dan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matriks sebagai berikut

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja Tahun 2021 - 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Target				Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
		2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	9.05	10.50	10.62	10.50	7.69	8.98	10.00	73.24	84.56	95	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	BB	BB	BB	A	BB	115.38	120	100	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	5.90	13.35	6.50	6.50	- 34.78	15.46	17	(260.52)	237.85	262	
Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber Data : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2022 – 2023 adalah sebagai berikut :

RASIO PAD

Realisasi kinerja Tahun 2022 – 2023 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2022 Nilai realisasi sebesar 8,98% dengan capaian 84,56 dan pada tahun 2023 dengan nilai realisasi 11% dengan capaian 105%.

Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah

Realisasi kinerja tahun 2022 – 2023 tidak mengalami perubahan yaitu tetap dengan capaian 100%

Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah

Realisasi kinerja tahun 2022 – 2023 mengalami peningkatan yaitu tahun 2022 sebesar 15,46 dengan capaian 237,85 dan tahun 2023 sebesar 17% dengan capaian kinerja 262%.

Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

Realisasi kinerja tahun 2022 – 2023 mengalami penurunan yaitu tahun 2022 dengan nilai A dan tahun 2023 dengan nilai BB

3. Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Perubahan RENSTRA

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah
Perubahan RENSTRA Tahun 2021-2023

	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Jangka menengah (2023)	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	10.50	7,69	8.98	10	73,24	84,45	95
1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	BB (6)	BB (5)	A (6)	BB	115,38	120	100
.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	6.50	-34,78	15.46	17	(260,52)	237,85	262
1.3	Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2023 merupakan tahun akhir jangka menengah renstra sehingga capaian pada tahun ini merupakan capaian jangka menengah renstra.

RASIO PAD

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir Renstra sehingga realisasi dengan target 10,50 % dan Realisasi adalah sebesar 10% dengan capaian kinerja 95%.

Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah

Realisasi kinerja tahun 2022 – 2023 mengalami penurunan yaitu tahun 2022 sebesar 15,46 dengan capaian 237,85 dan tahun 2023 sebesar 17 dengan capaian kinerja 262.

Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

Realisasi kinerja tahun 2022 – 2023 mengalami penurunan yaitu tahun 2022 sebesar dengan nilai A dan tahun 2023 dengan nilai BB

Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah

Realisasi kinerja tahun 2022 – 2023 tidak mengalami perubahan yaitu tetap dengan capaian 100%

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya serta dengan Kabupaten / Kota yang setara/sekitar

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagai Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan tidak termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar.

Untuk Realisasi Kinerja Kabupaten Kota dalam hal ini Kabupaten Maros dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. **8.000.000.000.** (*Delapan Milyar Rupiah*) sedangkan untuk Kabupaten Sinjai sebesar Rp. **110.600.000.000** (*Seratus sepuluh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*) Capaian Nilai Realisasi PAD kedua Kabupaten tersebut jika dibandingkan dengan pencapaian PAD Kabupaten Bone pada Tahun 2023 masih terbilang rendah dengan capaian realisasi Kabupaten Bone senilai Rp. **248.170.862.771.76** (*Dua Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel Ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Indikator Kinerja

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-Rata Capaian	Predikat			
				>110	90= s/d <110	60= s/d <90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	105					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	100					
Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah	262					
Meningkatnya Penggunaan Teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	100					
Rata-Rata Capaian total			139				

Sumber data : Kertas Kerja BAPENDA Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan / sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

RASIO PAD

Indikator Rasio PAD adalah merupakan indikator tujuan dengan formulasi perhitungan adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah Pendapatan Daerah dikalikan 100%,

Berdasarkan tabel Capaian kinerja pada Tahun 2022 – 2023 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2022 sebesar 84,56% dan pada tahun 2023 sebesar 95% nilai ini diperoleh dari nilai realisasi sebesar 10% dibagi target sebesar 10,50% dikalikan 100%. Apabila kita bandingkan target dan realisasi maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Rasio PAD dianggap berhasil dengan capaian sebesar 95%.

Meskipun demikian masih perlu upaya untuk meningkatkan PAD.

Adapun penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Objek Pajak mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2022 sebesar 624.107 dan pada tahun 2023 sebesar 712.12. Beberapa Objek pajak yang mengalami peningkatan sangat pesat antara lain Pajak restoran dari jumlah 796 di tahun 2022 dan 846 di tahun 2023, pajak Minerba dari jumlah 585 tahun 2022 dan 920 ditahun 2023, pajak reklame 534 tahun 2022 dan 604 tahun 2023 dan PBB P2 618.903 tahun 2022 dan 706.844 tahun 2023.
2. Terdapat 5 dari 11 objek pajak yang mencapai realisasi diatas 100% yaitu pajak Hotel mencapai 120,99%, pajak restoran 116,28%, Penerangan Jalan 101,61%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 102,55%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 101,99%, pencapaian ini diperoleh karena adanya penggunaan alat MPOS (alat Perekam pajak berbasis online) Dengan penggunaan MPOS ini setiap transaksi pada Cafe, rumah makan, dan objek pajak lainnnya akan terekam dan terkoneksi langsung secara real time dengan Bapenda dan Bank Sulselbar, sealin itu dengan adanya aplikasi SIMPADA yang dapat memudahkan masyarakat dalam penyetoran pajak secara online melalui Bank SulSelBar.

Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP pencapaian nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah adalah mencapai predikat BB (sangat baik) dengan nilai 76,70 . Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai maka nilai capaian kinerja untuk Nilai SAKIP adalah sebesar 100% dari target BB dan realisasi BB namun demikian nilai ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yakni sebesar 82,01 dengan kategori A (Memuaskan). Hal ini disebabkan karena dalam komponen penilaian SAKIP tahun 2022 terdapat perubahan sehingga untuk nilai SAKIP tahun 2022 semua OPD mengalami penurunan.

Persentase rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah

Capaian kinerja pada indikator persentase rata rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari target 6,50% dan realisasi sebesar 17%.

Capaian %

$$\frac{R}{R} \frac{P}{P} \frac{N - R}{P - N(Tahun)} \frac{P}{-N(Tahun)} \times 100\%$$

Realisasi PAD

Tahun 2022

Rp. 212.612.167.863

Tahun 2023

Rp.248.170.862.771.76

Adapun penyebab dari tercapainya sasaran II dan Tercapainya tujuan RASIO PAD pada Rencana Kerja Tahun 2023 sama saja karena dengan adanya peningkatan PAD maka sangat berpengaruh terhadap peningkatan Rasio PAD yang merupakan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah .

Masuk dalam kategori berhasil hal ini disebabkan oleh beberapa factor pendukung :

1. Upaya dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bone dalam mendorong masyarakat menggunakan teknologi informasi dalam pembayaran pajak daerah
2. Badan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan lembaga keuangan daerah dalam penggunaan teknologi untuk mendukung penerimaan pendapatan daerah yang akuntabel.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu

- 1 Penggalan potensi obyek pajak yang harus dioptimalkan
- 2 Meningkatkan pelayanan bagi investor sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Bone akan bertambah jumlah perusahaan / pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD
- 3 Badan Pendapatan Daerah Kab Bone mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam mendukung penerimaan pajak daerah yang efisien dan akuntabel dengan menambah pemasangan alat perekam pajak online (MPOS) di beberapa titik sampai ke kecamatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai Tujuan/Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah adalah sumber daya yang manusia, sarana dan prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023 untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan :

Tabel 3.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi sumber data
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7	8 (7/6*100)	1 (5-8)
Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	10.50	10.00	95	14,939,825,943	14,646,390,195	98.04	-2.80
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	BB	100	8,912,081,383	8,702,214,535	97.65	2.35
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	6,50	17	262.00	5,490,787,370	5,468,977,770	99.60	115.40
Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	100	100	100	536,957,190	475,197,890	88.50	11.50

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja sebagai berikut :

Rasio PAD

Dengan capaian Kinerja sebesar 95 % dan capaian anggaran sebesar 98% menunjukkan efisiensi sumber daya sebesar -2,80%

Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 97,65% menunjukkan efisiensi sumber daya sebesar 2,35%

Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah

Dengan capaian Kinerja sebesar 262 % dan capaian anggaran sebesar 99,60% menunjukkan efisiensi sumber daya sebesar 115,40%

Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah

Dengan capaian Kinerja sebesar 100 % dan capaian anggaran sebesar 88,50% menunjukkan efisiensi sumber daya sebesar 11,50%

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/Pmk.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program /Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	95						
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	100%						
			Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota				
			Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persentase realisasi cakupan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100	100	100	

			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5	5	100	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah akan disesuaikan dengan isu strategis
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi & pelaporan capaian kinerja perangkat daerah yang tersusun	3	3	100	Penyusunan Pelaporan ikhtisar capaian kinerja perangkat daerah akan dioptimalkan penyajian data nya.
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase cakupan penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah	100	100	100	
			Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan iuran jaminan/asuransi perbulan bagi pengelola keuangan perangkat daerah	12	12	100	Anggaran yang disesuaikan dengan jumlah ASN yang ada pada lingkup Badan Pendapatan Daerah
			Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah	Persentase Cakupan realisasi administrasi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah	100	100	100	

			Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun	1	1	100	Penyusunan rencana retribusi akan dioptimalkan
			Pengolahan data retribusi daerah	Jumlah dokumen data penerimaan retribusi daerah yang dikelola secara berkala	3	3	100	Data retribusi daerah yang dikelola akan disesuaikan dengan format pelaporan retribusi daerah
			Penetapan wajib retribusi daerah	Jumlah Penetapan wajib retribusi daerah	55	55	100	Jumlah wajib retribusi cenderung stagnan karena objek retribusi tidak bertambah
			Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	10	10	100	Penyusunan dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah akan di sesuaikan dengan format yang ada.
			Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	15.38	90	
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	10	9	90	ASN yang mengikuti bimbingan teknis akan lebih aktif mencari informasi tentang

								penyelenggaraan bimbingan teknis sesuai dengan tupoksi ASN
			Administrasi umum perangkat daerah	Persentase cakupan Administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12	12	100	Sub Kegiatan pendukung kegiatan pengelolaan pendapatan daerah akan senantiasa dioptimalkan ketersediaannya sehingga pelaksanaan administrasi pelaksanaan pengellaan pendapatan daerah makin optimal
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12	12	100	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencana kebutuhan	12	12	100	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan	12	12	100	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	12	12	100	

				undangan sesuai rencana kebutuhan				
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah	12	12	100	
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase Cakupan realisasi Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100	100		
			Pengadaan meubeler	Jumlah Pengadaan meubeler	3	3	100	Sarana dan prasarana penunjang administrasi pengelolaan pendapatan daerah akan dioptimalkan penyediaanya
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	6	6	100	Sarana dan prasarana penunjang administrasi pengelolaan pendapatan daerah akan dioptimalkan penyediaanya
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase cakupan realisasi Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	

			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah paket Penyediaan jasa komunikasi (internet) sesuai rencana kebutuhan setiap bulan	12	12	100	Sarana dan prasarana penunjang administrasi pengelolaan pendapatan daerah akan dioptimalkan penyediaannya
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah realisasi jasa pelayanan umum kantor	12	12	100	Sarana dan prasarana penunjang administrasi pengelolaan pendapatan daerah akan dioptimalkan penyediaannya
			Pemeliharaan Barang milik daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan operasional jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkala	12	12	100	Pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang pengelolaan pendapatan daerah akan terus dioptimalkan penyediaannya
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	12	100	

			Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan / rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1	100	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah				6,50	14	215	
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target				
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah	100	101.14	101.14	
			Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	1	1	100	1. Pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak daerah/wajib reribusi daerah untuk semua jenis pajak daerah dalam pemberian pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan
			Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	200	210	100	
			Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen penetapan jenis pajak atas ketetapan pajak daerah (penetapan	7	7	100	
			Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah dokumen pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi	4	4	100	

			Penagihan pajak daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang ditagih	610,660	621,031	102	2. n perizinan Optimalis asi penggalia n potensi pajak daerah melalui ekstensifi kasi dan intesifika si pajak daerah
			Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah kegiatan Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	1	1	100	
			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	3	3	100	
Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah				100	101.14	101.14	
			Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah laporan wajib pajak daerah yang dikelola pendataanya secara berkala	610,660	621,031	102	
			Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	4	4	100	
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1	1	100	

		Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah kegiatan layanan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak daerah	6	6	100
--	--	---------------------------------------	---	---	---	-----

Sumber data : Laporan Evaluasi RENJA Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut :

Rasio PAD

Dengan target 10,50%, realisasi 10% dengan capaian 95% Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

Dengan target BB dan Realisasi BB capaian kinerja sebesar 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah

Dengan target 6,50 dan realisasi 17% capaian Kinerja sebesar 262 % Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah

Dengan target sebesar 100 dan realisasi 100 capaian Kinerja sebesar 100 %

Indikator ini dapat terlaksana melalui program :
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Upaya Perbaikan Perbaikannya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2023 dengan melalui 4 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapai kinerja tahun berikutnya, yaitu:

Tujuan :

Meningkatkan kemandirian pendanaan pendapatan daerah

Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah rasionya masih kecil . PAD berkontribusi sebesar 10%. Terhadap pendapatan. Masih kecilnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi mayoritas daerah. Oleh sebab itu, diperlukan langkah untuk penguatan kapasitas fiskal di daerah yaitu dengan meningkatkan penggalan objek penerimaan Pendapatan Asli Daerah demi meningkatkan pendanaan yang mandiri dibidang pendapatan daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah

1. Peningkatan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja
2. Peningkatan sarana dan prasarana demi terlaksananya pelayanan perangkat daerah yang optimal

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk mewujudkan sasaran

1. Ekstensifikasi Pendapatan

Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjangkaran Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi baru. Penjangkaran Wajib Pajak baru dapat dilakukan melalui pemutakhiran data wajib pajak. Selain itu, untuk menarik minat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak daerah diperlukan kemudahan dalam pendaftaran salah satunya bisa melalui sistem daring.

2. Intensifikasi Pendapatan

Intensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Jika terdapat perubahan perlu

penyesuaian pada basis data. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar yang ada. Piutang Pajak Daerah merupakan salah satu permasalahan yang harus dapat diselesaikan dan akan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan verifikasi piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih, khususnya data piutang PBB-P2 yang selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, untuk piutang pajak daerah yang sudah kadaluarsa dapat dilakukan penghapusan sesuai peraturan perundang-undangan melalui ketetapan kepala daerah.

3. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis.

Kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone saat ini yaitu kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang perpajakan khususnya penilai pajak dan juru sita. Peningkatan wawasan SDM melalui penyertaan aparat dalam setiap Diklat, Workshop, Focus Group Discussion (FGD) dan forum-forum lainnya.

Modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan. Selain itu pemungutan perpajakan dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah dan kerjasama dengan instansi terkait antara lain Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk sinergi pengelolaan PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) untuk sinergi perizinan dan integrasi sistem informasi.

Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan

- a. Peningkatan Sarana & Prasarana system informasi pendapatan daerah
- b. Pengembangan Sistem Pendataan Wajib Pajak & Retribusi Daerah yang berbasis Teknologi Informasi

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 14.939.825.943 (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Tahun 2023

Uraian	Jumlah		
	Anggaran	Realisasi	Persen
Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah	14,939,825,943	14,646,390,195	98.04
Sasaran 1.1			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan	8,912,081,383	8,702,214,535	99.60
sasaran 1.2			
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	5,490,787,370	5,468,977,770	88.50
Sasaran 1.3			
Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	536,957,190	475,197,890	88%

Sumber Data : Realisasi Anggaran BAPENDA dalam aplikasi SIAEKUDA

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Berdasarkan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk Tahun 2023 dengan rata-rata nilai capaian kinerja yaitu 139% hal ini masuk dalam kategori *sangat tercapai*. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor.

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Adapun Kendala yang di hadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yaitu :

Berdasarkan penyebab tidak tercapainya tujuan diatas adalah hambatan yang ditemui dalam pencapaian tujuan pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 yaitu

Hambatan pada pencapaian Sasaran 1

1. Dokumen perencanaan perangkat daerah masih perlu disempurnakan penyusunannya;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan perangkat daerah

Hambatan pada pencapaian sasaran 2

1. Inefisiensi dalam pemungutan retribusi terutama yang *uncontrolable* oleh Bapenda,
2. Luas wilayah kabupaten Bone menyebar sehingga kesulitan untuk mengcover obyek pajak sehingga biaya pelayanan lebih besar dibandingkan nilai obyek pajak;
3. Peraturan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah.

Hambatan pada pencapaian sasaran 3

1. Belum optimalnya penggunaan Sarana & Prasarana sistem informasi pendapatan daerah
2. Belum optimalnya Sistem Pendataan Wajib Pajak & Retribusi Daerah yang berbasis Teknologi Informasi

Untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian target kinerja maka Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bone melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk mewujudkan yaitu :

Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan) yaitu:

1. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang administrasi pengelolaan pendapatan daerah
2. Memelihara barang milik daerah sebagai sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan daerah

Sasaran 1.2 Meningkatnya pendapatan asli daerah yaitu :

1. Ekstensifikasi Pendapatan
2. Intensifikasi Pendapatan
3. Penguatan Kelembagaan

Sasaran 1.3 Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam penggunaan pengelolaan pendapatan daerah yaitu

1. Peningkatan Sarana & Prasarana system informasi pendapatan daerah
2. Pengembangan Sistem Pendataan Wajib Pajak & Retribusi Daerah yang berbasis Teknologi Informasi